

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal:

- Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana).
- Afzal, Nadiyah. "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 348/ PID/2020/PT.BNA)," 2022.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Diindonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ali, M. Mahrus, Irfan Nur Rachman,dkk.*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada*
- Ananta, Aris (2015). *Demography of Indonesia's Ethnicity*. Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, Agus Pramono. SG: Institute of Southeast Asian Studies.
- Arend Lijphart. 1984. *Democracies – Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*", (New Haven: Yale University Press).
- Asfar, Muhammad, *Mendesain Manajemen Pilkada*, Pustaka Eureka, Surabaya: 2006.
- Dedi Mulyadi. 2012. *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing.
- Dwipayanti, Sumiarti. "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH BERBASIS KEPASTIAN HUKUM)," 2023.
- Effendy, Rusli. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI). Makassar.
- Elisyah, and Dani Sintara. "Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 02 (2023): 112–20. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.208>.
- Farid, H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010.
- Franky Siringoringo, July Esther, Jinner Sidaauruk. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IJAZAH UNTUK KEPERLUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD

- (Studi Putusan No.162/Pid.Sus/2019/PN.MAM)." *Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law* 01, no. 1 (2022): 13–21. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/toerekenbaarheid_law/article/view/573/606.
- Friedman, Lawrence M., 1977, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- G.Bingham Powell Jr. 2000. *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*". New Haven: Yale University Press.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Herbert Feith. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Irwansyah Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel.2020. Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Joko Prakoso. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Hatapan, Jakarta.
- Jouwe, N. (2014). *Back to Indonesia: Step, Thought, and Desire* Diarsipkan 2023-01-24 di Wayback Machine. PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanan nya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* Jakarta: PT Rineke Cipta, 2008.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Russel & Russel, New York.
- Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia" (pdf). www.bps.go.id.
- Khaerul, M, Amir Ilyas, and Audyana Mayasari Muin. "Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia Document Forgery System in Indonesia'S Election Crime." *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2022): 59–74.
- Kustiani, Rini (29 October 2020). "Asal Usul Nama Papua, Ada di Catatan Pelaut Portugis dan Spanyol". *Tempo* (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-07. Diakses tanggal 25 February 2021.
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Manullang, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan, Jakarta, 2013.
- Mengenal Suku-Suku Pegunungan Papua Barat". travel.detik.com

- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Dedi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta 2012, Gramata Publishing.
- Miriam Budiarto. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Merloe, Patrick. 1994. *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*, (Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat).
- Napitupulu, Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Disertasi*, Alumni, Bandung, 2004.
- Nugroho, Yudistira. "Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu." *MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* 1, no. 2 (2020): 168–77. <https://ojs.unars.ac.id/index.php/mimbarintegritas/article/view/2071>.
- Paimin Napitupulu. 2004. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Disertasi*, Alumni, Bandung.
- Politik, Perang, dan Pemekaran Papua". *Republika Online*. 2019-11-01. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-13. Diakses tanggal 2021-04-16.
- Prakoso, Joko, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Hatapan, Jakarta 1987.
- Projodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2023" (pdf). www.papuabarat.bps.go.id. hlm. 6, 50, 208. Diakses tanggal 22 Agustus 2023.
- Raharjo, Satjipto, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru.
- R.Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung.
- Robert A Dahl. 2001. *Perihal Demokrasi-Menjelajah Teori dan Praktek Demorkasi Secara Singkat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI). Makassar.
- Sambarita, Hendrikus Iswanto. "TINDAK PIDANA PENGGUNA IJAZAH PALSU STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 355//PID.SUS.2015//PN.KPG.," no. 20 (2015): 57–70.
- Santoso, Topo dan Ida Budiati, 2019, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006.
- Septarius Kahar, kuasa hukum pada Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. 2010. Bandung.

- SIAGIAN, A D E ONNY. "AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH," 2022.
- Sihombing, Rolando Fransiscus (17 November 2022). "DPR Sahkan RUU Provinsi Papua Barat Daya Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-17. Diakses tanggal 17 November 2022.
- Slama, Martin (2015). *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities*. Canberra: Australian National University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tanjung, Yusrizal Rezki. "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota Dprd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)." *Jimhum* 1, no. November (2021): 1–10.
- Tanjung, Yusrizal Rezki. "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota Dprd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)." *Jimhum* 1, no. November (2021): 1–10.
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama.
- , 2014. *Peranan Hukum Pidana Dalam Proses Demokrasi*. Pidato Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. 2010. Bandung.
- The United Nations Centre for Human Rights*. 1994. *Professional Training Series No. 2, Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*.
- Wahyu, Winda, Ningtyas H Abd, and Wahid Diyan. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU LEGISLATIF (Studi)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021, 506–21.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zaidan, Ali dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*.
- Zulpikar, Auliya Khasanofa. "TINJAUAN KRITIS AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2022.” *Jurnal Hukum SAMUDRA KEADILAN* 18, no. 2023 (2022): 376–88.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PP No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat Diarsipkan 2021-11-16 di Wayback Machine. Database Peraturan (in Indonesian). 18 April 2007. Retrieved 20 August 2021.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 145.

Studi Dokumen, Kejaksaan Negeri Nabire, 2018.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyangkut independensi dan tanggungjawab KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Website Internet:

Dugaan Kecurangan dalam Pilbup Fakfak, Kaimana, dan Manokwari, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16935>, Jumat, 29 Januari 2021, diakses pada 10 September 2023.

<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/e-book%20penanganan%20pelanggaran%20pilkada%202020.pdf>
<https://setkab.go.id/penanganan-keberatan-atas-pelanggaran-penyelenggaraan-pemilihan-umum/>
<https://setkab.go.id/penanganan-keberatan-atas-pelanggaran-penyelenggaraan-pemilihan-umum/>, akses 10 September 2023.